PERLUASAN PLAZA INDONESIA

Rendering perluasan Plaza Indonesia yang terdiri dari apartemen (gedung sebelah kanan), perkantoran (tengah) dan perluasan pusat perbelanjaan yang menempati bangunan podium.

Segera berlangsung pelaksanaan konstruksi proyek perluasan Plaza Indonesia berlokasi di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Peresmian dimulainya pembangunan proyek tersebut, telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jaya - Surjadi Soedirdja pada akhir September 1997 lalu.

"Tujuan diadakan acara peresmian ini, merupakan komitmen kami dalam berkarya dan terus membangun perluasan proyek Plaza Indonesia, sesuai dengan visi perusahaan. Di samping itu, proyek perluasan tersebut direncanakan dengan matang berdasarkan keyakinan akan kemampuan perusahaan dan perekonomian Indonesia yang kuat pada masa mendatang, " kata Bambang Trihatmodjo - Presiden Direktur PT Plaza Indonesia Realty.

Dalam sambutan pada upacara peresmian itu, dituturkan Direktur PT Plaza Indonesia Realty - Rosano Barack, Proyek Perluasan Plaza Indonesia (P3I) ini, meliputi perluasan Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia seluas 35.000 m^2, Apartemen 48 lantai seluas 46.500 m^2 dan gedung perkantoran 50 lantai seluas 61.500 m^2. Dibangun di atas lahan seluas 48.891 m^2 (termasuk area bangunan existing).

Perencanaan proyek, lanjut Rosano, dimulai sejak akhir September 1994 dan diharapkan akan selesai pelaksanaan konstruksi seluruhnya pada awal 2001. Adapun perencanaannya, dipercayakan pada H.O.K., St. Louis, USA yang dibantu oleh beberapa konsultan dalam dan luar negeri lainnya. Sedangkan kontraktor utama proyek, disetujui S.A.E., Perancis yang bekerjasama dengan PT Waskita Karya.

Dalam wawancara khusus seusai acara itu, dijelaskan Willy Sidharta - General Manager Project Development PT Plaza Indonesia Realty, pada proyek perluasan ini mempunyai 5 besmen dengan luas 55.483 m^2. Menurut rencana, akan dimanfaatkan sebagai sarana parkir dan dapat menampung sekitar 1.350 mobil. Selanjutnya, untuk perluasan pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, menempati pada bangunan podium setinggi 7 lantai dan di atasnya berdiri bangunan perkantoran bernama 'Menara Plaza' dan apartemen bernama 'Keraton'.

Pada apartemen eksklusif ini, didesain terdiri dari 3 tipe/ukuran hunian dengan jumlah 98 unit. Adapun perinciannya adalah, tipe Grand Penthouse berukuran 850 m^2 sebanyak 12 unit, Penthouse 400 seluas 400 m^2 ada 22 unit, dan Penthouse 250 berukuran 250 m^2 tersedia 64 unit.

Proyek perluasan tersebut, akan bergabung dengan bangunan existing hotel berbintang lima berlian Grand Hyatt Jakarta dan Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia sebagai suatu kawasan bisnis terpadu dengan nama Kawasan Plaza Indonesia.

Untuk itu, design brief dari pemberi tugas, ungkap Willy, agar rancangan merupakan kesinambungan dari desain bangunan existing. Juga, memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada dan mengikuti peraturan pemerintah, menyangkut perizinan KDB, KLB dan sebagainya.

Bahan finishing yang dipakai untuk menutup kulit bangunan pada perluasan pusat perbelanjaan, diusahakan seirama dengan bangunan yang ada saat ini, yaitu granit dan marmer. Begitu pula pada ruang dalam daerah publik.

Block Plan perluasan Plaza Indonesia.

Sementara itu, material yang digunakan pada facade bangunan apartemen dan perkantoran dipilih bahan granit dan kaca. Serta, untuk ruang dalam perkantoran (daerah publik), juga dipakai material granit dan marmer. Sedangkan lantai pada unit-unit perkantoran screed, dan penyelesaiannya diserahkan kepada tenant. Kemudian, untuk lantai ruang

dalam apartemen di-finish dengan bahan marmer.

Pengkondisian udara baik pada perkantoran, apartemen maupun pusat perbelanjaan, dipakai sistem sentral. Selanjutnya, berdasarkan perencanaan, total daya listrik yang dibutuhkan pada proyek ini sebesar 12 MVA dan di back-up dengan genset. Menurut perhitungan, back-up genset tersebut, untuk apartemen sebesar 100 persen, sedangkan perkantoran dan retail 70 persen.

Sarana transportasi vertikal untuk ketiga fungsi bangunan ini, akan dilayani dengan lift dan eskalator. Seluruhnya, berjumlah 39 unit lift (termasuk 3 unit lift executive pada perkantoran) dan 32 unit eskalator. Di samping itu, juga dilengkapi dengan fasilitas MATV, sarana komunikasi, sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, dan sebagainya. Menurut Willy, untuk sistem M&E di proyek ini, akan dikontrol dengan building automation system.

Lanjutnya, mengingat bangunan perluasan ini memiliki 5 lapis besmen dan berdampingan dengan bangunan yang sudah beroperasi. Di pihak lain, juga mempertimbangkan waktu pelaksanaan. Untuk itu, menurut rencana, pelaksanaan struktur besmen dilakukan dengan menggunakan metoda up-down construction. ■

Saptiwi

TIGA PEJABAT BARU DEPARTEMEN PU DILANTIK

Tiga pejabat baru eselon satu di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (PU), dilantik dan diambil sumpah oleh Menteri PU -Ir. Radinal Moochtar, akhir September lalu.

Pada pelantikan tersebut, Ir. Parulian Sidabutar menduduki posisi baru sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen PU, menggantikan pejabat lama, Ir. Ruslan Diwiryo. Pejabat baru, sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PU Bidang Sumber Daya Manusia. Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Pengairan, Departemen PU, yang tadinya dikomandoi Ir. Soeparmono, kini dipimpin Ir. Budiman Arief.

YUDDY KUSUMA

Tiga pejabat baru di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Dari kiri ke kanan Ir. Parulian Sidabutar (Sekjen) Ir. Budiman Arief (Dirjen. Pengairan) dan Tjuk Sudarsono M.Sc. (Dirjen Bina Marga).

Hingga keluarnya SK No. 278/M Tahun 1997 tanggal 19 September 1997 tersebut, Budiman Arief memegang jabatan sebagai Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Sedang Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Pengkajian Sistem Pengelolaan Pelaksanaan Pekerjaan Umum, Tjuk Sudarsono, M.Sc., menempati posisi baru sebagai Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen PU, menggantikan Ir. Soeharsono Martakim.

Dalam sambutannya, Menteri mengharapkan pejabat baru, yang mempunyai posisi penting dalam birokrasi pemerintahan dan pembangunan, memiliki wawasan kebangsaan nasional secara luas, serta memahami perkembangan masyarakat. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kata Radinal, kita perlu menghadapi tugas jabatan pimpinan dengan penuh kesungguhan dan melaksanakannya secara arif bijaksana.

Namun, tetap penuh kewaspadaan dan pengertian, untuk menciptakan citra birokrasi pemerintahan dan pembangunan, yang tidak saja tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Tetapi, juga mampu menjadi menjadi motor kemajuan dan kemandirian bangsa memasuki era globalisasi, yakni perdagangan terbuka dan persaingan bebas.

"Kita masih harus bekerja keras, mengerahkan segala daya upaya untuk tetap mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kita masih harus mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi mendasar, seperti mempertahankan swasembada pangan, penghapusan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, penyediaan perumahan rakyat, perluasan dan peningkatan mutu pendidikan. Penyiapan kader bangsa yang makin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta menciutkan kesenjangan sosial," tandas Menteri.

Ir. Ruslan Diwiryo, masih dibebankan penugasan perpetaan infrastruktur, berikut penyepurnaannya. Ir. Soeparmono, juga ditugaskan menyusun tulisan mengenai penanganan, konsep dan aturan pengelolaan lahan gambut sejuta hektar. Sedang mantan Dirjen Bina Marga, Ir. Soeharsono Martakim, diserahi tugas menyusun konsep penanganan dan pengelolaan jalan tol di Indonesia.

Sementara itu, mengomentari proyek jalan tol ditangguhkan dan ditinjau kembali, yang hingga kini ramai diperbincangkan, Menteri menganjurkan, agar investor bersangkutan tidak terlalu ngotot untuk segera merealisasikannya. "Kecuali, kalau progress-nya tinggal sekitar 20 persen, ya.. silakan jalan terus," ujar Radinal, seraya menambahkan, 'istilah' ditangguhkan dan ditinjau kembali tidak begitu cocok buat proyek jalan tol, berhubung berbagai proses sejak preliminary design, pembebasan tanah hingga masa konstruksi, membutuhkan waktu cukup lama.

Dikatakan, berbagai tahapan yang harus ditempuh para investor proyek jalan tol, hendaknya dilakukan secara normal saja, mengingat kebutuhan dana akan begitu besar, terutama tahap konstruksi. "Di tengah sulitnya situasi moneter, para investor (jalan tol), hendaknya mem-fungsional-kan dana yang ada," tandas Radinal.

Jalan tol, yang hingga kini terus diupayakan untuk dirampungkan mengingat fungsi infrastruktur begitu vital, antara lain Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi E1 dan E2. Selain itu, ruas tol Cirebon-Palimanan dan Semarang-Jatingaleh Seksi C, juga terganggu pelaksanaannya sehubungan gejolak moneter. ■ **Alexander P.**